

BPK Audit 18 Temuan di Kapuas Hulu

Viodeogo

Borneo Tribune, Putussibau

Selama 2011 audit tahunan telah dilakukan oleh BPK yang melakukan berbagai jenis audit dan telah menyampaikan 35 rekomendasi dari 18 jenis temuan. "Jumlah rekomendasi ini telah ditindaklanjuti tuntas sebanyak 12 rekomendasi sisanya sebanyak 23 rekomendasi sedang dalam proses penyelesaian," kata Bupati Kapuas Hulu, Senin (14/5).

Dalam rangka mewujudkan budaya pemerintahan yang bersih dari KKN, kata Nasir telah mengefektifkan dan mengoptimalkan fungsi pengawasan, baik melalui metode pengawasan melekat (wasakat) maupun melalui kegiatan pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh sejumlah lembaga pengawasan. Baik yang dilaksanakan oleh BPK, BPKP, inspektorat provinsi maupun inspektorat kabupaten.

"Melalui berbagai pelaksanaan pengawasan yang terus menerus tersebut diharapkan berbagai penyimpangan baik yang berkaitan dengan keuangan, aset daerah maupun pelanggaran disiplin aparatur dapat ditekan serendah mungkin," menurutnya tanpa merencni temuan dari BPK tersebut.

Di samping itu, melalui mekanisme pengawasan upaya mewujudkan *clean government* telah dilakukan pula melalui implementasi sistem akunta-

bilitas kinerja instansi pemerintah di mana setiap SKPD wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Peningkatan kemampuan keuangan daerah telah ditempuh melalui sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel serta upaya peningkatan penerimaan daerah dari berbagai sumber serta optimalisasi penerimaan PAD.

Tujuannya, agar pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat lebih meningkat serta terwujudnya efisiensi dan efektifitas pendanaan program dan kegiatan berdasarkan prioritas serta pengelolaan administrasi keuangan yang transparan, sistematis, terkendali dan dapat dipertanggung jawabkan.

Guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kaidah manajemen dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka pada setiap SKPD telah diupayakan terpenuhinya tenaga akuntansi dan tenaga terampil lainnya melalui program pendidikan dan latihan bagi para pejabat pengelola keuangan daerah dan para bendaharawan.

"Dalam upaya menciptakan akuntabilitas dan terwujudnya tertib administrasi pemerintahan telah diterbitkan produk hukum daerah baik yang bersifat mengatur maupun penetapan pada 2011 telah diterbitkan sebanyak 20 peraturan daerah 39 peraturan Bupati dan 377 keputusan Bupati," ujarnya.